

KEBIJAKAN PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PEMBENTUKAN WARGA DUNIA DENGAN KOMPETENSI ANTARBUDAYA

Fitri Alfarisy

Program Studi STr. Bahasa Asing Terapan, UNDIP, Indonesia

*Corresponding Author: fitri.alfarisy@live.undip.ac.id

Article History

Received : July 30th, 2021

Revised : September 02th, 2021

Accepted : October 18th, 2021

Published : November 02th, 2021

Abstrak: Pembelajaran bahasa asing di Indonesia telah mempunyai sejarah yang panjang. Pada jaman kolonial, bahasa asing telah diajarkan di sekolah tertentu, terutama bagi keturunan bangsawan dan anak-anak Belanda. Alih-alih ingin menciptakan generasi masa depan yang bisa bersaing di tingkat internasional di era globalisasi, pelajaran bahasa Inggris di Sekolah Dasar dihilangkan dan jam pelajaran bahasa Inggris di tingkat SMP dan SMA dikurangi di dalam kurikulum 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis berbagai kebijakan pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia dalam perspektif pembentukan warga dunia dengan kompetensi antarbudaya karena menjadi warga dunia di zaman globalisasi merupakan sebuah kepastian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik dokumen analisis. Berbagai dokumen dari buku, artikel penelitian maupun dokumen kurikulum sendiri dianalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia selama ini telah mengalokasikan pembelajaran bahasa asing sejak kurikulum pertama yaitu kurikulum 1947 sampai kurikulum 2013. Namun pada kurikulum 2013 alokasi pembelajaran bahasa asing lebih sedikit dibandingkan dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Di sisi lain, globalisasi menuntut untuk pembelajaran bahasa lebih banyak di tingkat sekolah dalam rangka pembentukan seluruh warga Indonesia menjadi warga dunia. Namun, pengaruh pembelajaran bahasa Inggris yang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia perlu diantisipasi dengan kompetensi antarbudaya. Oleh karena itu, dalam rangka pembentukan warga dunia melalui pembelajaran bahasa Inggris, baik peserta didik ataupun guru harus memiliki kompetensi antarbudaya yang tercermin di dalam materi pembelajaran sehingga tetap berbudaya Indonesia meski mempelajari bahasa Inggris.

Kata kunci: Kebijakan, Bahasa Inggris, Indonesia, Kompetensi AntarBudaya

PENDAHULUAN

Pembelajaran bahasa asing di Indonesia telah mempunyai sejarah yang panjang. Pada jaman kolonial, bahasa asing (seperti bahasa Belanda sebagai bahasa penjajah, serta bahasa Inggris dan Jerman) telah diajarkan di sekolah-sekolah tertentu, terutama di sekolah bagi keturunan para bangsawan dan anak-anak Belanda. Hal ini membuat penguasaan terhadap bahasa asing di kalangan pribumi pada masa penjajahan Belanda menjadi penanda kelas sosial yang tinggi atau terhormat di masyarakat yang saat ini juga masih terjadi. Seiring dengan perkembangan jaman, saat ini pembelajaran bahasa asing tidak lagi bersifat elitis karena semua orang bisa dengan mudah mempelajarinya bahkan bahasa Inggris sudah mulai dikenalkan

pada anak-anak sejak usia dini. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kelompok bermain ataupun Taman Kanak-Kanak yang sudah memberikan pelajaran bahasa Inggris pada anak didiknya.

Pada jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi, bahasa Inggris seolah menjadi suatu yang mutlak, berdampingan dengan mata pelajaran lain seperti bahasa Indonesia dan Matematika. Bahasa asing lain selain bahasa Inggris, seperti bahasa Jerman, Prancis, Jepang, Arab dan Mandarin pada umumnya dapat dipelajari ketika peserta didik masuk pada jenjang sekolah menengah atas. Posisi bahasa asing tersebut boleh dikatakan merupakan pelengkap karena yang utama tetaplah bahasa Inggris yang diakui sebagai bahasa Internasional.

Bahasa Inggris yang merupakan salah satu bahasa internasional secara tidak langsung memiliki posisi yang kuat dalam dunia pendidikan di Indonesia. Hal ini tidak dapat dihindari karena hampir sebagian besar ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang apapun ditulis di dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya sehingga penguasaan bahasa Inggris atau bahasa asing yang lain akan memberikan jalan bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau menyebarkan ilmu pengetahuan yang berkembang di Indonesia.

Selain itu, masyarakat global pada revolusi industri 4.0 saat ini telah menjadi masyarakat dunia yang tidak lagi tersekat dan terpisahkan oleh jarak dan waktu berkat adanya perkembangan yang cepat di bidang teknologi informasi. Masyarakat dunia menjadi masyarakat dunia yang satu dan tidak terpisahkan mengakibatkan penguasaan bahasa asing khususnya bahasa Inggris akan menjadi pintu agar bangsa Indonesia dapat berinteraksi menjadi warga dunia. Aspek ini menjadi salah satu pertimbangan besar mengapa bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya perlu diajarkan di sekolah. Kedua hal tersebut juga mengemuka dalam salah satu alasan rasional pengembangan Kurikulum 2013 yang disebut sebagai tantangan eksternal. Dalam Salinan Lampiran Permendikbud Nomor 69 tahun 2013 dijelaskan:

Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional...

Atas dasar itu, maka bisa dipahami jika kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Inggris untuk SMP dan SMA adalah mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. Masalah globalisasi sebenarnya juga sudah disinggung dalam kurikulum sebelumnya yang terwujudkan dalam Standar Isi mata pelajaran bahasa Inggris untuk tingkat SMP/MTs disebutkan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan mata pelajaran tersebut agar peserta didik memiliki kesadaran tentang hakikat dan pentingnya bahasa Inggris untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam masyarakat global.

Hal serupa juga dijumpai pada mata pelajaran bahasa Asing lainnya seperti bahasa Jerman dan bahasa Prancis. Namun, hal tersebut

terasa kurang sesuai dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat batas antar negara hilang dan peluang akan berkomunikasi dengan orang asing. Kebijakan pemerintah dalam kurikulum 2013 mencerminkan hal tersebut dengan sangat gamblang, alih-alih ingin menciptakan generasi masa depan yang bisa bersaing di tingkat internasional di era globalisasi, pelajaran bahasa Inggris di Sekolah Dasar dihilangkan dan jam pelajaran bahasa Inggris di tingkat SMP dan SMA dikurangi. Alfarisy (2020) menyatakan bahwa pemerintah memiliki slogan untuk mengutamakan bahasa Indonesia, Lestarian Bahasa Daerah dan Kuasai Bahasa Asing. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan bahasa Asing sifatnya wajib, namun kebijakan yang dikeluarkan terkait pengurangan jam pembelajaran bahasa Inggris dirasa sedikit menghambat pembentukan warga negara Indonesia sebagai warga dunia.

Keterampilan berbahasa asing tidaklah cukup untuk menjadi bagian dari warga dunia karena setiap warga dari suatu negara harus memiliki jati diri bangsa yaitu budaya. Orang Indonesia perlu mempelajari berbagai budaya bangsa di dunia manakala bangsa ini ingin menjadi bagian dari pergaulan dunia tetapi tanpa meninggalkan budaya asli bangsa yang dimiliki. Persatuan dan perdamaian antar bangsa akan tercipta ketika setiap negara dapat saling menghargai dan menghormati sekaligus toleransi terhadap budaya bangsa lain. Oleh sebab itu, artikel ini bertujuan untuk membedah kebijakan pendidikan bahasa Inggris di Indonesia dalam pembentukan warga dunia dengan perspektif kompetensi antarbudaya.

Keterkaitan Antara Budaya dan Pengajaran Bahasa

Para linguist dan antropolog telah lama menyatakan bahwa bahasa berfungsi sebagai alat untuk merefleksikan nilai-nilai budaya masyarakat di mana bahasa itu digunakan. Karenanya, bagi pembelajar sebuah bahasa, memiliki kompetensi bahasa saja tidak cukup untuk menguasai bahasa tersebut. Pernyataan Krasner (1999) ini menjadi salah satu alasan untuk menegaskan bahwa secara ilmiah budaya memiliki hubungan yang amat erat dengan bahasa, baik dalam konteks sosial maupun pendidikan. Dalam konteks sosial, bahasa menjadi media untuk berkomunikasi dan menyampaikan gagasan, pengalaman dan informasi tentang dunia di sekitarnya. Dalam dunia pendidikan, pengajaran bahasa asing

misalnya, memahami budaya penutur bahasa target menjadi suatu kelaziman. Oleh karena itu, pembelajar bahasa, tidak ada alasan lagi untuk tidak menyadari pentingnya literasi budaya bahasa target, seperti memahami budaya tindak tutur, cara memuji orang, meminta, setuju tidak setuju dan sebagainya. Tata cara dan etika berbicara masing-masing bahasa itu bebrbeda-beda, seperti intonasi, gaya bicara, mimik dan termasuk di dalamnya bahasa gerak tubuh. Komunikasi yang efektif dan lancar akan tercipta dengan menguasai budaya penutur bahasa tersebut.

Tidak aneh jika kemudian beberapa ilmuwan, pendidik dan profesional berpendapat bahwa tidak layak untuk mengajar bahasa tanpa mengajar budaya, peran guru bahasa di kelas sebagai mediator profesional antara bahasa asing dan budaya. Dengan kata lain, pengajaran bahasa selalu disertai dengan pengajaran budaya. Bahkan menurut Kramsch (1993) budaya dalam pengajaran bahasa memiliki peranan sangat sentral, ia menyebutnya bukan hanya keterampilan kelima, melainkan keterampilan yang selalu menjadi latar belakang dan dipelajari sejak hari pertama. Glison (1961) seperti dikutip oleh Ming-Mu Kuo dan Cheng-Chieh Lai;

that languages are not only the products of cultures, but also are the symbols of cultures. The development of a language frequently affects its associated culture, and cultural patterns of cognition and custom are often explicitly coded in language.

Pernyataan ini juga menjadi dasar bahwa belajar suatu bahasa adalah belajar budayanya. Kompetensi linguistik tidak cukup untuk memahami bahasa suatu bangsa atau kelompok masyarakat. Oleh sebab itu, kompetensi antarbudaya berperan sangat signifikan dalam proses penguasaan bahasa asing.

Kompetensi Antarbudaya

Liddicoat dalam Madya (2013) menawarkan unsur-unsur kompetensi antar budaya yang dikombinasikan dari konsep model kompetensi antarbudaya dari Byram dan Zarate (1994), Byram (1997), dan Sercu (2004) yaitu:

1. pengetahuan tentang diri dan orang lain, tentang produk dan praktik mereka dan proses umum interaksi (*savoir*), yang merupakan badan pengetahuan sebagai pijakan operasi-operasi lainnya yang disebut sebagai *savoir etre*;
2. disposisi sikap terhadap keterlibatan antarbudaya yang termanifestasikan dalam cara-cara mendekati penelajaran antarbudaya dengan

keingintahuan, keterbukaan dan reflektivitas (*savoir etre*);

3. Pemelajaran tentang cara-cara menafsirkan dan menjelaskan praktik atau dokumen budaya dan membandingkannya dengan aspek-aspek budaya sendiri (*savoir comprendre*);

4. kemampuan menemukan melalui keterlibatan pribadi dalam interaksi sosial (*savoir appandre*)

5. kemampuan melakukan evaluasi kritis yang berpengatuhan terhadap aspek-aspek budaya sendiri dan budaya orang lain (*savoir's engager*); dan

6. mekanisme mengatur diri yang memungkinkan pemelajar untuk merencanakan memantau dan mengevaluasi proses belajar mereka sendiri (dimensi meta-kognitif)

Sementara itu, Kaikkonen (2001) dalam Madya (2013) menyarankan subkompetensi yang melibatkan dimensi perilaku antarbudaya sebagai berikut:

- Kemampuan untuk menunjukkan hormat bagi seseorang yang berlatar belakang budaya yang berbeda, yaitu kemampuan untuk mengungkapkan hormat dan pertimbangan positif bagi orang lain;
 - Postur interaksi yang tepat, yang berarti di atas semua kemampuan untuk merespon pada prang lain dalam cara deskriptif, non-evaluatif dan tanpa penilaian;
 - Orientasi baru pada pengetahuan, khususnya untuk istilah-istilah yang digunakan untuk menjelaskan diri dan dunianya sendiri;
 - Kualitas empati yang seluruhnya penting, kapasitas untuk berperilaku seolah seseorang memahami dubia seperti orang lain;
 - Pengetahuan tentang perilaku peran tugas, yaitu perilaku yang melibatkan prakarsa gagasan dalam konteks kegiatan pemecahan masalah keompok;
 - Kemiripan, pengetahuan tentang perilaku peran rasional, yaoutu perilaku yang terkait dengan harmoni dan mediasi antarpribadi;
 - Kemampuan untuk mengelola interaksi, yang menuntut keterampilan dalam mengatur percakapan dan mengelola komunikasi nonverbal;
 - Toleransi ambiguitas, yaitu kemampuan mereaksi situasi baru dan ambigu dengan sedikit ketidaknyamanan yang tampak.
- Kaiokkonen dalam Madya (2013) menyebutkan bahwa keterampilan dan pengetahuan teknis antarbudaya mencakup:
- Kemampuan untuk membawa budaya asli (sendiri) dan budaya asing untuk bersentuhan satu dengan yang lainnya;

- Kepekaan budaya dan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menggunakan berbagai strategi untuk melakukan kontak dengan orang-orang dari budaya lain;
- Kapasitas untuk memainkan peran penyambung budaya antara budaya sendiri dan budaya asing dan menangani secara efektif kesalahpahaman antarbudaya dan situasi konflik;
- Kemampuan untuk menangani hubungan yang terlalu distereotipikana (CEFR, 2001)
- Kesadaran budaya kritis: keterlibatan pribadi dalam memahami diri sendiri dan orang lain dan menyadari dasar etis dan moral yang dijadikan pijakan;
- Multiperspektivitas: kapasitas untuk melihat perkara dari lebih dari satu sudut pandang (ELP)
- Konteks Indonesia yang multibudaya dan multibahasa dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika menyiratkan kebutuhan mendasar akan pembelajaran antarbudaya, yang dapat dipenuhi lewat pembelajaran bahasa dengan pendekatan antarbudaya.

Liddicoat dkk (2003) dalam Madya (2013) juga menyatakan bahwa pada tingkat global tujuan pembelajaran bahasa antarbudaya adalah sebagai berikut:

- Memahami dan menghargai semua bahasa dan budaya;
- Memahami dan menghargai bahasa (bahasa-bahasa) dan budaya (budaya-budaya) sendiri;
- Memahami dan menghargai bahasa dan budaya targetnya;
- Memahami dan menghargai bagaimana menjembatani di antara bahasa dan budaya yang berbeda;
- Mengembangkan kepekaan antarbudaya sebagai tujuan berlanjut.

Dari semua kompetensi dan subkompetensi antarbudaya dapat disimpulkan bahwa kompetensi antarbudaya mencakup komponen pengetahuan, perilaku dan sikap pembelajar, pada posisinya masing-masing dan pada posisi interaktif. Pembelajar harus memiliki pengetahuan tentang budayanya sendiri dan budaya orang lain dan tahu bagaimana menjembatani perbedaan antara kedua budaya tersebut yang teramati dari perilaku berbahasa mereka (Madya, 2013). Hal ini sesuai dengan pandangan Liddicoat et, al (2003) dalam Madya (2013) yang menyatakan bahwa kompetensi antarbudaya merupakan bagian dari kompetensi komunikatif.

METODE

Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan untuk studi, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik dokumen analisis dilakukan untuk pencarian data. Menurut Edi Subroto (1992), teknik analisis dokumen merupakan pencarian data dengan sumber tertulis yang mencerminkan pemakaian bahasa secara sinkronis. Teknik ini digunakan dalam rangka untuk memperoleh data yang akan dianalisis. Berbagai data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis terkait kebijakan pendidikan bahasa Inggris di Indonesia kemudian dibaca, dicatat, dianalisis dan disajikan dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan pada tahun 2019 dengan mengumpulkan berbagai dokumen terkait kebijakan bahasa Inggris di Indonesia baik berupa buku maupun artikel jurnal. Selain itu, guna mendapatkan data lebih lengkap, dokumen kurikulum 2013 juga dianalisis untuk mengetahui penerapan kebijakan bahasa Inggris di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis dokumen berbagai kebijakan pendidikan bahasa Inggris di Indonesia, tersajilah beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Sejarah Pembelajaran Bahasa Inggris di Indonesia

Pengembangan pengajaran Bahasa Inggris tampak jelas setelah Mr. Wachendorf, orang pertama yang menjabat Kepala Inspektorat Pusat Pengajaran Bahasa Inggris di Departemen Pendidikan menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 096/1967 pada tanggal 12 Desember 1967. Keputusan tersebut menyatakan bahwa Bahasa Inggris berkedudukan sebagai bahasa asing pertama yang harus diajarkan di sekolah-sekolah menengah di Indonesia. Adapun tujuan pengajaran Bahasa Inggris, menurut Wachendorf ialah untuk membekali siswa dengan "working knowledge of English". Pengajaran Bahasa Inggris tersebut berlandaskan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, No. 096/1967, yang masih berlaku sampai sekarang. Tujuan akhir dari pengajaran Bahasa Inggris di dalam kurikulum 1946, 1953, 1962, 1968, 1975, 1984, 1994 untuk SMP/SLTP, dan 1950, 1962, 1968, 1975, 1984, 1994 untuk SMA/SMU, pada prinsipnya sama, yaitu membekali siswa dengan kemahiran Bahasa Inggris dengan penguasaan

kecakapan: membaca, mendengar, menulis, dan berbicara. Akan tetapi, di dalam kurikulum 1984 dan 1994 disebutkan prioritasnya berubah menjadi: membaca, menyimak, berbicara, dan menulis.

Kurikulum bangsa Indonesia juga mencatat beberapa perubahan kebijakan pendidikan bahasa Inggris yang tercermin dalam jumlah jam pendidikan bahasa Inggris di setiap tingkat pendidikan dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Perubahan implementasi kurikulum pendidikan dari tahun 1947 sampai dengan Kurikulum 2013 membawa pandangan sendiri di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kebijakan pemerintah terkait pendidikan bahasa Inggris di tingkat dasar, menengah dan atas berdasarkan kurikulum terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Pengajaran Bahasa Inggris dari Kurikulum 1947 sampai dengan Kurikulum 2013

No	Kurikulum	Tingkat	Jumlah Jam		
			SD	MP	MA
1	K.1947	SMP – SMA		4 jam/minggu	2-3 jam/minggu
2	K.1958	SMP – SMA		4 jam/minggu	3-4 jam/minggu
3	K. 1964	SMP – SMA		4 jam/minggu	3-4 jam/minggu
4	K. 1968	SMP – SMA		3 jam/minggu	3-4 jam/minggu
5	K. 1975	SMP – SMA		4 jam/minggu	3-7 jam/minggu
6	K. 1984	SMP – SMA		4 jam/minggu	3-7 jam/minggu
7	K. 1994	SMP – SMA		4 jam/minggu	4-6 jam/minggu
8	KBK 2004	SD – SMA	2 jam/minggu	4 jam/minggu	4-6 jam/minggu

9	KTSP 2006	SD– SMA	2 jam/minggu	4 jam/minggu	4-5 jam/minggu
10	K. 2013	SMP – SMA		4 jam/minggu	2 jam/minggu

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kebijakan pendidikan bahasa Inggris di tingkat satuan pendidikan berbeda pada setiap kurikulum. Di tingkat Sekolah Dasar dapat dipahami bahwa pendidikan bahasa Inggris dikenalkan secara resmi berdasarkan kurikulum pada tahun 2004 dan 2006 dengan jumlah jam hanya 2 jam/minggu. Mata pelajaran bahasa Inggris pun tidak tertulis secara eksplisit menuliskannya dalam mata pelajaran yang diajarkan akan tetapi termasuk dalam mata pelajaran muatan lokal (mulok). Dengan pengenalan bahasa Inggris di level dasar ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menguasai serta mengenal bahasa Inggris terlebih dulu. Berbeda halnya dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 menghilangkan pembelajaran bahasa Inggris di tingkat sekolah dasar. Tak ayal guru bahasa Inggris pun di tingkat dasar menjadi korban dari kebijakan ini yaitu tidak mempunyai jam mengajar sedangkan para siswa tidak memiliki dasar pembelajaran bahasa Inggris.

Pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), bahasa Inggris sudah mulai dikenalkan pada saat kurikulum yang pertama dibuat oleh bangsa Indonesia yaitu tahun 1947 sampai kurikulum 2013. Jumlah jam yang dialokasikan untuk pembelajaran bahasa Inggris ialah 3 – 4 jam/minggu. Di sisi lain, jumlah jam yang dialokasikan untuk pendidikan bahasa Inggris di tingkat SMA mengalami penurunan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Dimulai dari alokasi waktu sejumlah 2-3 jam/minggu di dalam kurikulum 1947 meningkat sampai 3-7 jam/minggu tergantung pada konsentrasi atau jurusan siswa pada kurikulum 1975, lalu bergerak pada standar yang hampir sama yaitu 4-6 jam/minggu tergantung pada jurusan siswa tersebut. Namun terjadi penurunan drastis pada kurikulum 2013 yaitu hanya menjadi 2 jam/minggu. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah lebih peduli akan pendidikan bahasa Indonesia pada kurikulum-kurikulum sebelum kurikulum 2013.

Perkembangan Pengajaran Bahasa Inggris berdasarkan Metode Pengajaran

1. Era Prametode

Kebijakan Bahasa Inggris di Indonesia tidak hanya terdapat pada perubahan jumlah alokasi pendidikan bahasa Inggris di sekolah saja, akan tetapi juga terkait dengan metode pengajaran bahasanya. Pengajaran bahasa Inggris terbagi atas tiga era yaitu prametode, metode dan post metode. Setiap era memiliki ciri khas masing-masing yang disesuaikan dengan kondisi siswa sekaligus perkembangan ilmu saat itu. Era prametode mempunyai ciri khas yaitu praktis tanpa dapat membuktikan secara sistematis bahwa cara-cara pengajaran tertentu lebih baik dari yang lain (Madya: 2003). Hal ini menyiratkan bahwa pada era tersebut para pengajar masih belum memiliki dasar teori yang cukup kuat, pengajar hanya mengajarkan bahasa Inggris menggunakan metode yang mereka anggap lebih memahami siswa melalui intuisi mereka. Dalam era prametode yang berlangsung sejak zaman kuno sampai tahun 1940an, terdapat empat metode pengajaran bahasa Inggris yang berkembang yaitu metode tatabahasa-terjemahan (MTT), metode langsung (ML), metode kompromi (MK) dan metode membaca.

2. Era Metode

Era metode merujuk pada era dimana metode pengajaran dianggap sebagai faktor utama keberhasilan pembelajaran bahasa lain selain bahasa ibu (Madya: 2013). Dalam hal ini, beberapa faktor di luar metode kurang menjadi perhatian dalam pembelajaran bahasa asing. Berkebalikan dengan era pra metode, di era metode sebuah landasan teori tentang bahasa, pengajaran dan pembelajaran harus digunakan dalam suatu metode. Seperti dinyatakan oleh Stern (1983:463) dalam Madya (2013: 29) “*The audiolingual theory was probably the first language teaching theory that openly claimed to be derived from linguistics and psychology.*” Dengan sangat lugas dinyatakan bahwa sebuah metode pengajaran haruslah diturunkan dari teori-teori terkait dicontohkan dengan metode audiolingual yang diperoleh dari teori-teori linguistik dan psikologi.

Dalam era ini, para pakar juga berusaha untuk menemukan metode terbaik yang dapat diaplikasikan oleh guru. Dalam era ini, ilmu pengajaran bahasa berkembang sangat pesat karena para peneliti berlomba-lomba menemukan metode terbaik dengan dasar teori terkuat untuk

diterapkan dalam pendidikan bahasa asing. Berbagai metode yang berkembang serta muncul dalam era ini adalah metode Audio-Lingual, Audiovisual, Lisan-situasional, metode Kognitif, Humanistik-afektif, Community Language Learning atau Pemelajaran Bahasa Komunitas (Silent Way atau Cara Diam, Suggestopaedia dan Total Physical Response (TPR) atau Respon Raga Total), Metode Berbasis Pemahaman dan metode Presentation, Practice, Production (PPP). Berbagai metode tersebut muncul karena para peneliti berlomba-lomba untuk menemukan metode yang paling sempurna, akan tetapi hal yang terjadi adalah beberapa kekurangan suatu metode melahirkan metode baru yang digunakan untuk menutupi kekurangan metode tersebut.

3. Era Pascametode

Era Pascametode atau lebih banyak dikenal postmethod era lahir dari kegagalan pencarian metode terbaik untuk pengajaran bahasa Inggris untuk setiap siswa di dunia. Bayangkan saja, Indonesia yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau serta ratusan suku dan bahasa dan juga dengan fasilitas yang berbeda-beda serta karakteristik siswa yang sangat berbeda-beda diharapkan menerapkan satu atau beberapa metode tertentu yang dianggap metode terbaik dalam pengajaran bahasa Inggris merupakan hal yang tidak mungkin dilaksanakan. Suatu metode mungkin akan terasa cocok untuk diterapkan dalam suatu pengajaran bahasa Inggris di suatu tempat dengan suatu karakter siswa yang tertentu pula. Metode yang sama tidak dapat diterapkan dalam pengajaran bahasa Inggris di tempat lain. Brown (2002) dalam Madya (2013:107) menyatakan empat sebab utama surutnya metode dalam suatu pengajaran bahasa yaitu:

1. metode terlalu preskriptif, berasumsi terlalu banyak tentang konteks, bahkan sebelum isinya ditentukan. Oleh sebab itu, metode-metode itu berlebihan generalisasinya dalam penerapan potensialnya pada situasi praktis;
2. secara umum, metode sangat berbeda untuk tahap-tahap awal pelajaran bahasa dan tidak begitu berbeda satu sama lain dengan metode-metode untuk tahap-tahap yang lebih tinggi;
3. pada masa lalu diduga bahwa metode dapat diuji secara empiris melalui kuantifikasi ilmiah untuk menentukan metode mana yang ‘terbaik’. Sekarang telah ditemukan bahwa sesuatu yang bersifat seni dan intuitif seperti pedagogi bahasa tidak akan pernah secara jelas dapat diverifikasi melalui validasi empiris;

4. metode itu sarat dengan apa yang dirujuk oleh Pennycook (1989) sebagai “pengetahuan berkepentingan” yaitu setengah politis atau agenda pesanan dari pelopornya. Karya mutakhir dalam daya dan politik pengajaran bahasa Inggris ... telah menunjukkan bahwa metode sering berupa kreasi “pusat” yang berkuasi sekaligus menjadi kendaraan bagu umperialisme linguistik ... menyasar kelompok pinggiran tak berdaya.

Alasan-alasan tersebut mungkin terasa mengejutkan, akan tetapi sebaliknya seorang guru harus mulai merefleksikan diri dalam pengajaran bahasa Inggris apakah metode yang diterapkan dalam pengajaran bahasa terlalu mendikte guru dan mengekang kebebasan mereka atau tidak. Hal yang perlu dipertanyakan juga apakah pengajaran bahasa Inggris itu murni terkait pengajaran bahasa Inggris ataukah ada agenda lain tersembunyi dalam pengajaran bahasa Inggris. Beberapa hal tersebut mendorong munculnya era pascametode. Dalam era ini, Kumaravadivelu (2003) dalam Madya (2013) menyatakan bahwa pedagogi pascametode membantu kita untuk bergerak dan berkreasi melampaui metode walaupun konsep tentang metode tetap penting dalam pembelajaran bahasa dan pendidikan guru karena untuk dapat melaksanakan pedagogi ini seorang guru harus sudah berpengalaman menerapkan berbagai metode yang diusulkan oleh para pakar.

Pedagogi pascametode ini memiliki tiga parameter yaitu kekhususan (Particularity), kepraktisan (practicality), dan kemungkinan (possibility). Kekhususan berarti teknik pengajaran yang digunakan oleh guru haruslah tergantung pada situasi pengajarannya yaitu di mana, kapan dan siapa yang diajar. Hal ini berarti bagaimana pengajaran berlangsung tergantung pada berbagai faktor sosial-budaya dan politik dari masyarakat yang diajar.

Di Indonesia yang merupakan negara multikultur dan negara kepulauan mengharuskan analisis situasi berbagai konteks dan faktor dilakukan oleh guru guna mencapai kesuksesan dalam pengajaran bahasa Inggris. Kumaravadivelu (2003) menyatakan bahwa parameter kekhususan adalah tuntutan bahwa guru memiliki pengetahuan yang memadai tentang metode dan teknik yang dapat mereka pilih untuk menemukan metode mana yang dapat langsung diterapkan di dalam pengajaran dan mana yang perlu dimodifikasi, Parameter kedua yaitu kepraktisan berarti suatu metode hendaknya diterapkan dalam situasi nyata sehingga antara teori dan praktik terdapat keterkaitan.

Suatu teori tidak mempunyai arti ketika hanya ditulis saja tanpa dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan parameter ini, para guru tidak harus mengaplikasikan teori yang sudah tersedia akan tetapi mereka juga dapat berperan dalam pembuatan teori pengajaran mereka sendiri yang mereka kembangkan dari praktik mereka mempraktikan apa yang mereka teorikan. Para guru tidak lagi menjadi konsumen teori-teori yang dibuat oleh pakar yang selama ini mungkin tidak menghadapi situasi yang dihadapi oleh para guru. Oleh karena itu, berdasarkan pedagogi ini guru dapat menentukan cara pengajaran terbaik di dalam kelas walaupun hal tersebut bertentangan dengan beberapa teori. Parameter terakhir adalah kemungkinan yang berarti bahwa metode hendaknya tepat secara sosial, budaya dan politis (Kumaravadivelu: 2003). Hal tersebut mencerminkan bahwa dalam proses pengajaran guru dan siswa secara alami melibatkan keyakinan, pikiran, cara pandang serta kepribadian mereka di dalam kelas.

Kebijakan Pembelajaran Bahasa Inggris dalam Perspektif Kompetensi Antarbudaya

Semua orang tidak lagi perlu bertanya mengapa kita perlu untuk mampu berbahasa Inggris seperti kebutuhan akan tidur dan makan yang berarti bahwa bahasa Inggris secara tidak langsung sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita walaupun hal itu tidak berarti bahwa dengan penguasaan bahasa Inggris yang kita lakukan sudah sempurna. Pengajaran bahasa Inggris juga telah menanamkan para siswanya secara tidak sadar untuk tidak menggunakan berbagai ekspresi yang dianggap melanggar privacy individu warga asing seperti ekspresi ‘How old are you?’, ‘Are you married’, dan ‘where are you going?’. Para siswa secara tanpa sadar, dididik lewat pengajaran bahasa, untuk memperlihatkan toleransi yang sangat besar pada perasaan orang asing sampai pada taraf menyensor diri sendiri dan mengabaikan cara pandang budaya lokal terhadap sifat dan maksud pertanyaan-pertanyaan di atas.

Kita tidak selalu ingat bahwa dalam budaya Indonesia, pertanyaan-pertanyaan, seperti ‘Umur Anda berapa?’, ‘Anda sudah menikah?’, ‘Anda mau ke mana?’ dan yang sejenisnya tidak selalu merupakan ungkapan yang bertujuan untuk mencari informasi. Seringkali, dalam komunikasi sosial di masyarakat kita, pertanyaan-pertanyaan tersebut lebih berfungsi secara fatis, yakni sebagai

strategi pembuka atau penyambung percakapan, sama seperti bila seorang Inggris berkomentar tentang cuaca atau bertanya ‘How are you today?’ Kita tidak selalu menyadari bahwa diperlukan toleransi yang sama besar dari seorang penutur asli sebuah bahasa ketika bahasanya digunakan sebagai medium komunikasi oleh seorang nonpenutur asli dalam suatu hibriditas dengan cara berpikir dan bertutur kata lokal.

Pelajaran yang melekat dalam benak para siswa itu adalah mereka tidak diperbolehkan untuk bertanya a, b, c, d pada seorang penutur asli bahasa Inggris karena hal itu dapat menyinggung perasaannya. Ada kemungkinan bahwa pelajaran seperti ini akan diturunkan oleh para siswa kita itu ke orang lain sebagai semacam model “pemberadaban”. Mereka menjadi warga baru kelompok elit yang mengerti bagaimana cara memuja budaya asing, tetapi tidak memiliki cukup bekal untuk mampu menghargai budaya sendiri. Hal ini dapat tercermin dalam gaya bahasa vikinisasi ataupun gaya bahasa anak Jaksel yang memadukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing guna menunjukkan bahwa mereka memiliki kelas sosial yang lebih tinggi. Budiman dalam (academia.co.id) menceritakan bahwa:

“dalam sebuah seminar yang menghadirkan seorang antropolog peneliti berkebangsaan Amerika bertahun-tahun lampau, saya dibuat terhenyak tanpa mampu berkata apa-apa oleh cara antropolog itu menafsirkan, ‘Masak apa hari ini?’ yang diucapkan oleh ibu-ibu PKK dalam penelitiannya. Ia melakukan penelitian tentang PKK dan berangkat dari dugaan bahwa PKK adalah salah satu aparatus ideologis pemerintah yang digunakan untuk mengawasi gerak-gerik warganya sendiri. Penelitian dilakukan selama kira-kira setahun di sebuah kampung di Yogyakarta, dan selama itu, menurutnya, setiap hari selalu saja ada ibu-ibu anggota PKK yang mampir ke rumah kontrakannya (tanpa membuat perjanjian dahulu tentu saja) untuk bertanya, ‘Masak apa hari ini?’

Dalam penafsirannya, antropolog itu membaca kunjungan dan pertanyaan tersebut sebagai kedok bagi tindakan memata-matai gerak-gerik seorang warga asing yang sedang melakukan penelitian di daerah itu. Tidak terbersit dalam benaknya bahwa ‘Masak apa hari ini?’ secara sederhana bisa jadi hanyalah suatu strategi pendekatan para ibu itu untuk dapat mengenal “tamu”-nya dengan lebih dekat. Bagi si antropolog, ucapan itu tak bisa lain berarti manifestasi pengawasan terselubung yang

dilakukan negara melalui tangan PKK, sebagaimana yang telah didiktekan oleh paradigma teoritis risetnya!”

Berdasarkan situasi di atas, perlulah kiranya sebagai warga dunia perlu mempelajari kompetensi antarbudaya dan membekali diri dengan kepekaan lintas-budaya walaupun hal ini biasanya diberikan pada pihak yang dianggap lebih lemah. Masyarakat Indonesia secara tidak langsung diminta mengharagai budaya-budaya asing yang merangsek masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan kita dengan beralasan bahwa kita harus menghormati dan menghargai budaya mereka ketika budaya itu tidak sesuai dengan norma dan nilai masyarakat. Hal ini sedikit banyak menjadi landasan bagi pemerintah untuk berbagai kebijakan untuk menekan hegemoni bahasa Inggris di Indonesia.

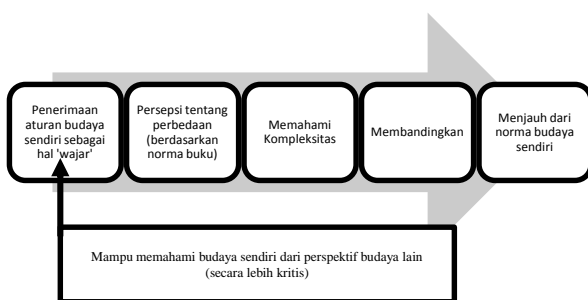
Berdasarkan Undang-Undang No.24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan setiap warga negara Indonesia diperintahkan untuk menguasai bahasa asing tanpa mengurangi rasa nasionalisme karena bahasa Indonesia diharapkan menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Undang-undang tersebut juga dengan jelas mengatur posisi Bahasa Indonesia, Bahasa daerah dan Bahasa Asing. Dalam undang-undang tersebut status bahasa Inggris tidak disebutkan yang menunjukkan kebijakan pemerintah dalam penekanan hegemoni bahasa Inggris agar masyarakat Indonesia lebih mencintai budaya dan bahasa Indonesia.

Di samping kondisi itu, kebijakan bahasa di Indonesia yang terbaru semakin menempatkan bahasa Inggris pada posisi yang lemah dengan dihapuskannya mata pelajaran bahasa Inggris dari kurikulum 2013 di tingkat Sekolah Dasar (SD) serta dikurangnya alokasi waktu untuk pelajaran bahasa Inggris di tingkat SMA yang penerapannya dimulai tahun 2014. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga sedikit menghambat sasaran Kemenristekdikti untuk mendorong Perguruan Tinggi menghasilkan karya ilmiah dengan kaliber internasional. Keterampilan berbahasa Inggris, khususnya dalam penulisan karya ilmiah tidak dapat dicapai dalam waktu singkat karena harus melalui proses panjang, yakni kegemaran memakai bahasa Inggris, latihan melalui trial and error, pembiasaan diri sampai pada proses pengajuan tulisan untuk dipublikasikan yang pasti akan diwarnai dengan penolakan-penolakan dan revisi. Proses seperti itu sudah barang tentu harus dimulai sejak usia dini. Kebijakan bahasa lainnya yang membatasi

pemakaian bahasa Inggris di Indonesia adalah pembatasan pemakaian bahasa Inggris dalam penyiaran seperti tercantum dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam UU ini disebutkan, bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sesuai dengan keperluan suatu mata acara siaran.

Berbagai kebijakan pemerintah saat ini untuk menekan hegemoni bahasa Inggris haruslah diikuti dengan pengajaran antarbudaya dalam upaya untuk menjadikan bangsa Indonesia mempunyai jati diri yang kuat dalam pergaulan dunia. Pembelajaran bahasa Inggris yang akan berdampak pada gegar budaya bahkan juga memperlebar sikap elitis dapat dihindari dengan kompetensi antarbudaya yang dimiliki oleh para peserta didik karena pada dasarnya dalam kompetensi antarbudaya pelajar harus memiliki pengetahuan tentang budayanya sendiri dan budaya orang lain dan tahu bagaimana menjembatani perbedaan antara kedua budaya tersebut yang teramati dari perilaku berbahasa mereka (Madya, 2013).

Hal ini dapat dicapai dengan pembelajaran bahasa Inggris berbasis kompetensi antarbudaya dengan membandingkan antara budaya lokal dan budaya Inggris. Proses pembelajaran bahasa antarbudaya di Indonesia dapat menggunakan modifikasi model DMIS (Development Model of Intercultural Sensitivity) oleh Liddicoat (2011) dalam Madya (2013) yang tergambarkan di bawah ini.



Gambar 1: Kemajuan dalam Pelajaran Antarbudaya (Dimodifikasi dari Liddicoat, 2011: 849 dalam Madya, 2013: 211)

Gambar 1 menunjukkan bahwa kemajuan pembelajaran antarbudaya diawali dengan penerimaan budaya aturan budaya sendiri sebagai hal yang wajar, kemudian menciptakan persepsi budaya pertama dimodifikasi dengan asupan buku dan materi. Pelajar lalu mengembangkan pemahaman yang lebih kompleks tentang gejala-gejala budaya dengan peningkatan pemahaman tentang gejala yang

dipelajari yang dilanjutkan dengan pemberian pengaitan secara dasar antara perspektif budaya pertama dan budaya sasaran. Proses ini akhirnya sampai pada titik dimana pelajar menjauh perspektif budaya pertama sehingga dengan menggunakan perspektif budaya lain mereka menjadi mampu melihat budaya sendiri secara objektif dan kritis untuk mencapai pemahaman yang lebih baik

Pengaplikasian pembelajaran bahasa antarbudaya dapat mempersempit kesenjangan antara budaya Barat yang dominan dan budaya-budaya lokal yang minoritas. Luciana (2005) juga menekankan pada pentingnya mempertimbangkan budaya lokal dalam pembelajaran bahasa Inggris. Seorang pengajar bahasa Inggris mau tidak mau harus memahami budaya bahasa yang diajarkannya demi kepentingan praktis.

Namun, jika kemudian pengetahuan akan budaya asing ini diajarkan secara gegabah, penilaian yang salah kaprah tentang budaya lain juga bisa terjadi. Sepakat dengan pemikiran Bassnett, Luciana (2005) juga mengemukakan bahwa citarasa suatu budaya terwujud dalam kosakata, tata kalimat, dan bentuk ungkapan lain dalam bahasa yang berasal dari budaya tersebut. Pengajaran bahasa Inggris berdasarkan kompetensi antarbudaya di Indonesia juga akan mampu mengembangkan identitas kita sendiri yang diperkaya oleh budaya lain. Berbagai budaya asing bermanfaat sejauh dapat menjadi sarana untuk membangun keluasan wawasan. Di dalam proses belajar-mengajar bahasa Inggris, daya kritis siswa harus dirangsang pada setiap tahapan pembelajaran. Mereka selayaknya didorong untuk menanggapi metode yang digunakan sebuah buku teks, mempertanyakan foto-foto dan ilustrasi-ilustrasi yang muncul di dalamnya, dan mempersoalkan mengapa suatu gagasan dinyatakan dengan cara tertentu dalam bahasa asing yang dipelajari untuk melihat letak "keanehan" cara berpikir budaya yang melahirkan bahasa tersebut.

Pembelajaran di kelas akan terasa sangat menarik bagi para siswa untuk mendiskusikan bersama, misalnya, mengapa pasir hisap dalam bahasa Inggris disebut dengan quicksand, padahal proses penghisapan terjadi dengan perlahan-lahan atau mengapa arena tinju disebut dengan boxing ring, sementara bentuk arena tersebut tidak melingkar melainkan persegi? Mengapa vegetarian berarti pemakan sayur-sayuran, sedangkan humanitarian tidak berarti pemakan manusia melainkan sesuatu yang terkait

dengan kemanusiaan? Demikian pula ketika kita mengajarkan bahwa bangsa Inggris mempunyai tradisi minum teh yang sudah mendarah daging, apakah kita juga menunjukkan kepada para siswa keanehan tradisi ini dibandingkan dengan tradisi menyajikan teh manis dalam budaya Jawa.

Dalam beberapa situasi pembelajaran bahasa Inggris pengajar harus bersikap kritis, karena seringkali dijumpai aspek budaya yang menyertai sebuah ujaran kebahasaan tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal sebagai contoh ungkapan bahasa Inggris yang sering kita dengar yaitu *Time is money*. Jika direnungkan ungkapan tersebut cenderung mendorong manusia untuk memanfaatkan waktu seefisien mungkin demi mengejar sesuatu yang bersifat materi, kita harus memahami bahwa ungkapan tersebut datang dari negara industri yang memiliki latar belakang budaya kapitalis. Ungkapan ini agak berbeda nuansanya dengan misalnya pepatah Jawa yaitu *alon-alon asal kelakon* yang mengandung pesan agar kita tidak tergesa-gesa, sabar dan hati-hati. Hal-hal seperti inilah yang perlu dikritisi oleh pengajar dan peserta didik berbekal kearifan lokal. Oleh karena itu, dalam rangka pembentukan warga dunia melalui pembelajaran bahasa Inggris, baik peserta didik ataupun guru harus memiliki kompetensi antarbudaya.

KESIMPULAN

Globalisasi secara umum dan perlunya penguasaan bahasa Inggris tidak dapat sepenuhnya ditolak. Hal yang perlu disikapi secara kritis adalah paradigma globalisasi seperti apa dan penguasaan bahasa Inggris untuk tujuan apa yang harus kita formulasikan agar gegar yang dialami oleh identitas kultural dan bahasa ibu kita tidak membuat kita mengadopsi cara pandang hegemonik yang di satu pihak bersifat universalistik terhadap dunia dan melihat perbedaan sebagai penyimpangan atau tanda ketakberadaban. Kenichi Ohmae (1991) menyatakan bahwa, pada era globalisasi ini, kita dilahirkan bukan untuk menjadi bagian dari sesuatu, melainkan untuk membeli ('not to belong but to buy'). Jadi, identitas kita ditentukan oleh apa yang kita konsumsi. Dengan demikian, pengajaran bahasa Inggris tidak sekadar berurusan dengan bagaimana membuat para pembelajar mahir berbahasa asing, tetapi juga dengan bagaimana mereka dapat menjadi kritikus budaya yang berwawasan plural. Jika sasaran ini dapat dicapai dengan efektif, maka potensi ancaman yang terkandung dalam

pembelajaran bahasa Inggris akan dapat diubah menjadi kemungkinan-kemungkinan pemerayaan budaya dan pandangan bangsa Indonesia dalam pembentukan warga dunia yang memiliki kompetensi antarbudaya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Prof. Suwarsih Madya yang telah memberikan pencerahan dalam penulisan penelitian ini dan berbagai pihak yang telah membantu penyusunan artikel.

REFERENSI

- Alfarisy, F. (2020). Kajian Budaya: Kebijakan Bahasa di Tengah Pandemi Covid19. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, 4(3), 343-353.
- Bassnett, Susan. (2005). *Making Sense of the Global Village dalam Warwick The Magazine, Issue 6, Spring (edisi ulang tahun ke-40)*.
- Budiman, Manneke. *Pengajaran Bahasa Asing Peng-“Indo”-an atau Pencerahan Bangsa?.* www.academia.edu.
- Kramersch, C.. (1993). *Context and Culture in Language Learning*. Oxford: Oxford University Press.
- Kumaravadivelu, B. (2003). *Beyond Methods: Macrostrategies for language teaching*. New Haven, CT: New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- Kuo, Ming-Mu, and Cheng-Chieh Lai. (2006). *Linguistics across Cultures: The Impact of Culture on Second Language Learning*. Online Submission.
- Luciana. (2005). *Whose Culture: Your Culture? My Culture? A case of English language learning in Indonesia, dalam Stuart A. Bruce & Antonius Suratno. Proceeding Representation of Cultural Values in Language and Literature*. Semarang: Soegijapranata Chatolic University.
- Madya, Suwarsih. (2013). *Metodologi Pengajaran Bahasa: dari Era Prametode*

- sampai Era Pascametode*. Yogyakarta: UNY Press.
- Ohmae, Kenichi. (1991). *Global Consumers Want Sony not Soil dalam New Perspectives Quarterly Fall*.
- Pattiwael, Athriyana. (2005). *Developing Culture Sensitive Language Instructional Activity: Some emerging issues and considerations dalam Stuart A. Bruce & Antonius Suratno (peny.). Proceeding Representation of Cultural Values in Language and Literature*. Semarang: Soegijapranata Chatolic University.
- Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
- Undang-Undang No.24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
- Undang- Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 096/1967 pada tanggal 12 Desember 1967